

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HASIL  
PENANGKAPAN IKAN DI KELURAHAN SUMPANG  
BINANGAE KABUPATEN BARRU**

**NURWANDA**

**Nomor Stambuk : 105641103818**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
HASIL PENANGKAPAN IKAN DI KELURAHAN SUMPANG  
BINANGAE KABUPATEN BARRU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

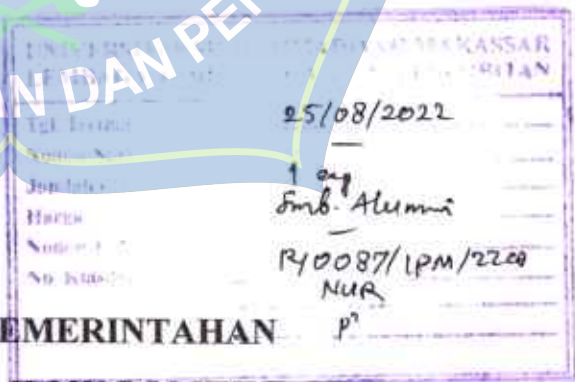
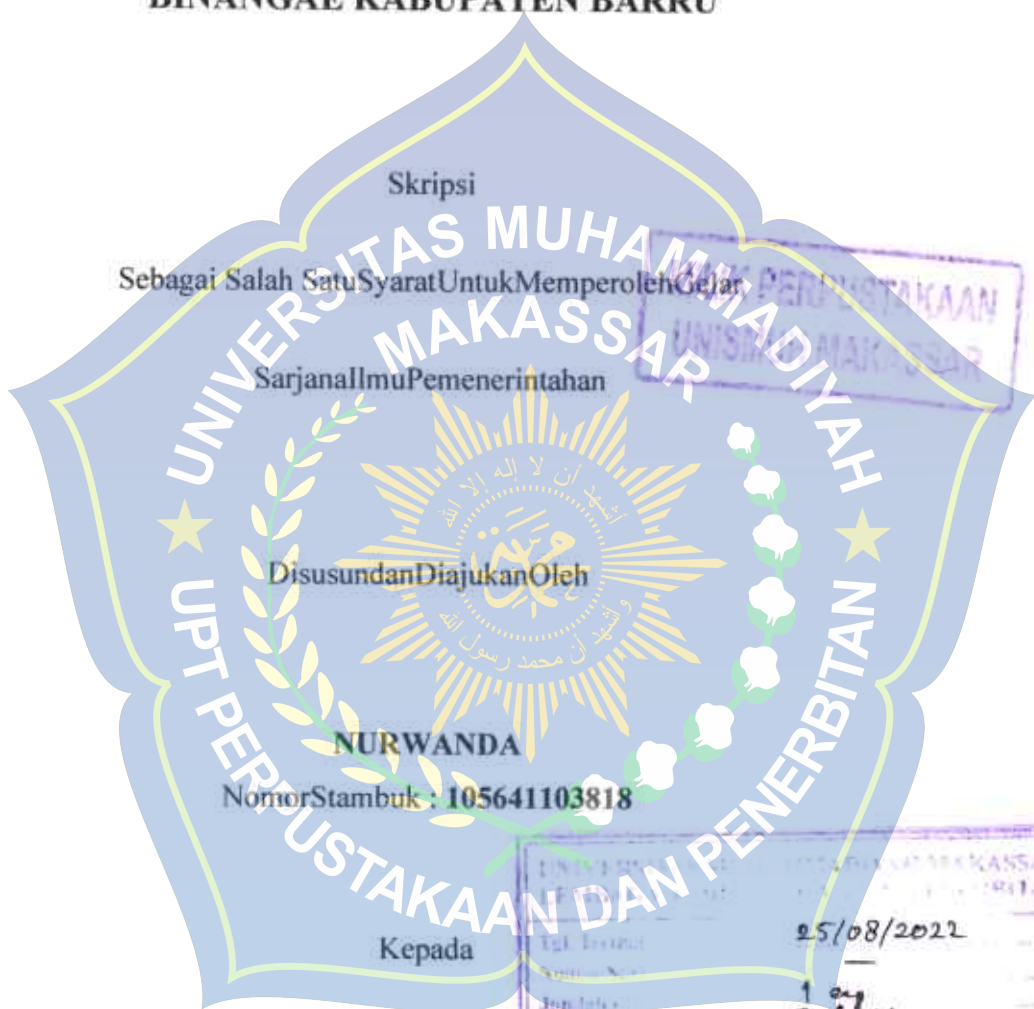
**NURWANDA**

Nomor Stambuk : **105641103818**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**



## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Dalam  
Pengelolaan Hasil Penangkapan Ikan di  
Kelurahan Sumpang Binage Kabupaten Barru  
Nama Mahasiswa : Nurwanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 105641103818  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdi, M.Pd

Hamrun, S.IP., M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730 727

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I  
NBM. 1207 163

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0081/FSP/A.5-II/V/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu 16 Juli 2022.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



A. Luhur Prianto S.IP, M.Si

Penguji

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua)
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
3. Dr. Abdi, M.Pd
4. Nurkhaerah, S.IP., M.IP



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurwanda

Nomor Stambuk : 105641103818

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 12 Februari 2022

Yang menyatakan



Nurwanda

## ABSTRAK

**Nurwanda (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hasil Penangkapan Ikan di Kelurahan Sumpang Binange Kabupaten Barru (dibimbingoleh Abdi, dan Hamrun)**

Penelitian ini bertujuan untuk bentuk pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil penangkapan ikan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hasil penangkapan ikan menunjukkan dari empat indikator, yaitu Penguatan pendanaan, dimana dalam hal pemberdayaan masyarakat nelayan, pemerintah memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk diperoleh pelaksanaan pemberdayaan, serta memberikan kemudahan mendapatkan modal tambahan usaha kepada para pengusaha kecil melalui pinjaman koperasi dan sebagainya. Mendorong pemasaran, memberikan kesempatan kepada para pengusaha kecil untuk mempromosikan hasil usahanya. Membantu sarana dan prasarana, pemerintah memberikan bantuan kepada para masyarakat guna untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan serta proses pengelolaan hasil penangkapan ikan. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah pelatihan, dan tempat penjemuran ikan kering. Proses pemberian pembinaan dan pelatihan. Memberikan pelatihan terkait dengan proses penangkapan ikan, pengolahan ikan, serta proses pemasaran ikan yang telah di kelolah.

**Kata Kunci :** Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan hasil perikanan.

## ABSTRACT

Nurwanda (2022). *Community Empowerment in Management of Fishing Products in Sumpang Binangae Village, Barru Regency*  
(supervised by Abdi, and Hamrun)

*This study aims to empower the community in processing fish catches in Sumpang Binangae Village, Barru Regency. The type of research used is a qualitative research method and the type of research used is descriptive. Data collection techniques using observation and interviews.*

*The results of the study show that community empowerment in the management of fishing results shows from four indicators, namely strengthening funding, where in terms of empowering fishing communities, the government provides financial assistance to the community to obtain empowerment implementation, and provides convenience in obtaining additional business capital to small entrepreneurs through cooperative loans and so on. Encouraging marketing, providing opportunities for small entrepreneurs to promote their business results. Helping facilities and infrastructure, the government provides assistance to the community in order to optimize the empowerment process and the process of managing fish catches. The facilities and infrastructure in question are training, and a place for drying dried fish. The process of providing coaching and training. Provide training related to the process of catching fish, processing fish, and marketing processes of fish that have been managed.*

**Keywords:** *Community Empowerment, Management of fishery products.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah Swt, sehingga skripsi dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hasil Penangkapan Ikan di Kelurahan Sumpang Binange Kabupaten Barru" dapat terselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt, atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan tulisan dengkalimat apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan Salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Saw, dengan segala petunjuk, kesehatan, dan nasehat agama.

Tidak lupa penulis menghanturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua saya, atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengajar dan mendidik sejak kecil sampai sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan diakhirat.
2. Ayahanda DR. Abdi, M.Pd selaku pembimbing I dan Hamrun, S.IP.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibunda Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

5. Ayahanda dan ibunda dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Teman-teman kelas IP.A yang selama ini menemani selama proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar..

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah Swt sebagai amal ibadah. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak penulis sangat harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Sampul .....                                        | i   |
| Halaman Persetujuan .....                           | ii  |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....      | iii |
| Abstrak .....                                       | iv  |
| Daftar Isi .....                                    | v   |
| Daftar Tabel .....                                  | vi  |
| Daftar Gambar .....                                 | vii |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                           |     |
| A. Latar Belakang .....                             | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                            | 6   |
| C. Tujuan Penulisan .....                           | 6   |
| D. Manfaat Penulisan .....                          | 6   |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                     |     |
| A. Penelitian Terdahulu .....                       | 8   |
| B. Kerangka Teori .....                             | 11  |
| 1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....             | 11  |
| 2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ..... | 15  |
| 3. Pengolahan Hasil Perikanan .....                 | 22  |
| C. Kerangka Pikir .....                             | 28  |
| D. Fokus Penelitian .....                           | 29  |
| E. Deskripsi Fokus Penelitian .....                 | 29  |
| <b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>               |     |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                | 31  |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian .....                  | 31  |
| C. Sumber Data .....                                | 32  |
| D. Informan .....                                   | 33  |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                    | 33  |
| F. Teknik Analisa Data .....                        | 34  |
| G. Keabsahan Data .....                             | 36  |

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| A. Deskripsi Objek Penelitian .....                                | 39 |
| B. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hasil Perikanan ..... | 43 |
| C. Pembahasan .....                                                | 53 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 57 |
| B. Saran .....      | 59 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 60 |
|-----------------------------|----|



**DAFTAR TABEL**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..... | 8  |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian .....  | 34 |



**DAFTAR GAMBAR**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Gambar 3.1. Bagan Kerangka Pikir ..... | 30 |
|----------------------------------------|----|



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keberadaan otonomi daerah sebagai roh asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lahir sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertical (Sugianto, 2020). Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspons dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal.

Keberadaan otonomi daerah, melalui dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah (Faisal, 2013). Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Disuatu sisi perubahan itu akan memberikan kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang

produktif dan dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap masukan pendapatan asli daerah, salah satunya adalah industri-industri dengan bahan baku berasal dari sumberdaya alam daerah tersebut. Diharapkan industri-industri di daerah dapat berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan dan pengembangan industri-industri tersebut merupakan peluang bisnis besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor-sektor lain yang terkait dengan industri tersebut.

Dari sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku-pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Dengan arti, tantangan yang pasti dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana pelaku bisnis di daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

Industri perikanan menjadi salah satu komoditi yang banyak diolah di Indonesia dengan jumlah ikan yang luarbiasa melipah dari kekayaan laut Indonesia khususnya di Daerah Sulawesi Selatan yang dikenal memiliki kedalam laut yang dalam mencapai ribuan meter dengan berbagai macam spesies dan jenis ikan yang beraneka ragam. Menjadi tatangan buat

pemerintah untuk membantu masyarakat sekitar pesisir laut untuk meningkatkan produktifitas dalam hal pengolahan hasil laut (Fauzi, 2005).

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (Margolang, 2018).

Kabupaten Barru memiliki luas wilayah penangkapan ikan laut sekitar 56.160 Ha, tambak sekitar 2.570 Ha, pantai 1.400 Ha, dan budidaya kolam air tawar 39 Ha. Zona pemanfaatan perairan di wilayah pesisir Kabupaten Barru terdiri dari zona perikanan tangkap berkelanjutan dengan luas total wilayah mencapai 43.935 Ha, dengan estimasi jumlah tangkapan maksimum lestari/maksimum sustainable yield (MSY) yaitu 23.975 Ton, dan potensi perikanan tangkap sebesar 0,68 ton/Ha. Zona pemanfaatan budidaya laut adalah 389,99 Ha berada pada wilayah Teluk Labosso, Teluk Siddo, Teluk Labunge dan Awerange, Pulau Batukalasi dan Pulau Bakki. Zona konservasi terdiri dari konservasi laut dan konservasi mangrove berada di

Pulau Pannikiang dan wilayah laut yang ada disekitarnya dengan luas wilayah konservasi mencapai 525,2 Ha (BPS Kabupaten Barru 2020).

Adanya perubahan musim (penangkapan dan paceklik) membuat pendapatan usaha tangkap maupun pendapatan rumah tangga nelayan tradisional bahkan pengeluaran untuk konsumsinya di wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Barru menurun sehingga membutuhkan pendapatan di luar usaha tangkap. Walaupun Kebijakan Program Bantuan Sarana prasarana (Sapras) dari pemerintah Kabupaten Barru melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Barru Tahun 2015 berupa mesin tempel dan alat tangkap telah dilakukan, akan tetapi perubahan pendapatan usaha tangkap belum mencukupi kebutuhan rumah tangga nelayan tradisional. Untuk itu keberadaan keberadaan program pemberdayaan dalam pengolahan hasil penangkapan ikan sebagai penyokong kebutuhan ekonomi rumah tangga sangat dibutuhkan mengingat hasil tangkapan ikan tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Melalui peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani termasuk didalamnya para pelaku usaha pengembangan dan penangkapan ikan terbentuklah program dimana masyarakat tidak hanya bergantung pada kegiatan hasil perikanan. Tetapi kegiatan yang mengedepankan pemberdayaan bagi masyarakat dalam mengelola hasil perikanan agar memiliki peningkatan perekonomian bagi masyarakat,

Kondisi dan pengolahan sumberdaya perikanan tangkap di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru secara kasat mata terlihat cukup memadai, tetapi masyarakat tidak mampu mengelolah hasil tangkapannya dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan berbagai fasilitas penunjang kegiatan pengolahan sumberdaya perikanan seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI) dan berbagai jenis armada yang digunakan oleh nelayan. Potensi sumberdaya perikanan merupakan pendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sumber informasi ilmiah terkait gambaran kondisi sumberdaya perikanan tangkap termasuk pengolahannya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat nelayan dan instansi terkait. Melihat adanya peluang yang sangat baik, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru bekerja sama dengan Dinas Koprindag Kabupaten Barru untuk melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan di lapangan, dimana banyak masyarakat yang telah bekerja sebagai seorang nelayan selama bertahun-tahun lamahnya, tetapi banyak masyarakat yang tidak mengalami perubahan, tidak ada peningkatan yang terjadi pada masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih mengantungkan hasil tangkapan yang mereka dapatkan untuk di jual kepada tengkulak dan di kirim ke luar daerah, sarana dan prasarana nelayan yang belum mempunyai serta masih banyak menggunakan alat yang masih bersifat tradisional. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hasil tangkapan

ikan yang mereka dapatkan dan kurangnya pendampingan setra bimbingan dari Pemerintah setempat tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hasil tangkapan ikan.

Selama ini hasil tangkapan ikan masyarakat yang di kelolah masyarakat menjadi ikan kering, belum mampu memberikan nilai jual yang tinggi karena tidak mampu bersaing dengan pengelolah ikan-ikan kering lainnya yang berasal dari luar daerah. Hal tersebut karena banyak ikan-ikan hasil olahan dari luar daerah yang masuk, misalnya hasil olahan ikan dari Bulukumba, selayar dan sebagainya.

Kurangnya kemampuan masyarakat nelayan dalam mengelolah hasil tangkapannya yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mampu bersaing di pasaran. Tingginya tingkat persaingan dalam peroses pemasaran ikan kering, yang menyebabkan banyak masyarakat yang bekerja sebagai nelayan hanya menjual ikan tangkapannya dalam bentuk utuh ke pemasok tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu. Padahal jika masyarakat mampu mengelolalah hasil tangkapannya dengan baik, akan sangat membantu dalam perekonomiannya dan juga mampu bersaing di pasaran.

Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah Kabupaten Barru untuk hadir dalam menciptakan program-program strategi yang mengarah kepada pemberdayaan terkhusus dari segi pengelolaan hasil tangkapan ikan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mengelolah ikan yang baik dan benar, sehingga menciptakan nilai jual yang tinggi dan dapat menjadi

salah satu mata pencaharian masyarakat untuk meningkatkan sektor ekonominya.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru yang berfokus terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil Penangkapan Ikan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil Penangkapan Ikan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara teoritis**

1. Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengolahan hasil perikanan.

2. Memberikan masukan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengolahan hasil perikanan.

b. Secara Praktis

1. Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengolahan hasil perikanan di tempat lain lain.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Salah satu cara penyusunan skripsi ini berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang berupa karya tulis terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Hal itu untuk menghindari penelitian berulang tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan Hasil Perikanan. Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti     | Judul                                                                                            | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                 | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. | (Hariyanto, 2014) | Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek | Untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat nelayan di pesisir Prigi yang demikian, diperlukan pelaksanaan program pemberdayaan yang dapat diwujudkan melalui kemandirian masyarakat nelayan. Program pemberdayaan yang dilakukan harus mampu menjawab semua masalah yang di hadapi masyarakat nelayan di Prigi, selain itu program yang dilakukan harus |

|    |                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                | <p>melibatkan masyarakat sebagai peran utama dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi. Keberhasilan suatu program pemberdayaan bergantung pada stakeholder ini yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan menempatkan masyarakat nelayan sebagai subyek dan objek pembangunan. Dengan adanya pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat diharapkan dapat turut meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan, baik fisik maupun non fisik.</p> |
| 2. | (Rosnida, 2016) | <p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata (Meneropong usaha penginapan masyarakat Lokal dan Manca Negara di Desa Mon Ikeun Lhoknga)</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa usaha yang berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa ini. Kedatangan turis peselancar juga membuka wawasan anak-anak muda di desa tersebut. Selain berupaya mendatangkan pendapatan, cara pandang terhadap internet juga memberikan dampak positif bagi anak-anak muda di desa. Namun masih terdapat kekhawatiran akan dampak negatif dari pergaulan dengan orang-orang manca negara di wilayah ini seperti</p>             |

|    |                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                    | <p>prostitusi, berpakaian tidak sesuai syariah, pergaulan bebas dan minum-minuman keras. Penelitian ini juga menunjukkan bias gender antara laki-laki dan perempuan, dimana para anak muda lelaki bisa berlatih berselancar, sehingga bisa menjuarai kegiatan internasional. Namun perempuan di Mon Ikeun lebih kepada menikah dengan lelaki asing, menjadi pekerja domestik. Kesempatan untuk setara dengan lelaki Mon Ikeun adalah belajar bahasa Inggris dari para turis.</p>                      |
| 3. | (Bolkiah, 2021) | <p>Evaluasi Program Bidang Pemberdayaan Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur</p> | <p>Hasil penelitian evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan masih banyak yang menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah untuk menyuksekannya. Selain anggaran yang terbilang masih sedikit, akses informasi, pengadaan sarana dan prasarana yang terbilang masih sangat kurang memadai. Sedangkan, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pamekasancenderung dari tahun ke tahun meningkat didapat oleh</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | masyarakat nelayan.<br>Sehingga pemerintah<br>daerah Kabupaten<br>Pamekasan dirasa sangat<br>perlu untuk<br>mengakomodasi<br>kepentingan-kepentingan<br>bagi masyarakat nelayan |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(Sumber: Jurnal Pemerintah Daerah di Indonesia, Tahun 2014-2021)

Pada tabel 2.1 penelitian terdahulu merupakan rujukan penelitian yang mempunyai kesamaan dan perbedaan terkait melihat kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian yang di lakukan oleh Hariyanto, 2014 dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian Hariyanto lebih berfokus ke bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menjadi salah satu aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengelolah hasil tangkapan ikannya.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat nelayan. Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh Rosnida, 2016 dengan penelitian yang saya lakukan adalah dimana pada penelitian yang di lakukan oleh Rosnida, berfokus kepada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha pariwisata untuk menopang usaha penginapan local dan manca Negara. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengelolah hasil tangkapan ikannya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh

Bolkiah, 2021 dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian Bolkiah, fokus penelitiannya adalah Evaluasi program bidang pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengelolah hasil tangkapan ikannya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan (Pratiwi, 2017:17).

Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Komponen utama pemberdayaan dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali dalam menentukan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan (Yefni, 2018:43).

Menurut Moelijarto dalam (Rahayu, 2017:5) bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Menurut (Suharto, 2006:77), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- b) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya.
- c) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- d) Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.

- e) Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat

Selanjutnya terdapat tujuan dari pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Subiyanto, 2013:45).

Kusumahadi dalam (Sutawa, 2012:413) menyatakan bahwa program pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber-sumber daya, terpenuhinya kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol sosial terhadap aspek lingkungan.
- 2) Pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi lokal (*self-management*).
- 3) Pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya.

Dalam pengolahan sumber daya alam, pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya tersebut. Pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan diperlukan untuk menjaga agar manfaat dari sumber daya alam tersebut dapat dirasakan secara terus menerus pada generasi yang akan datang untuk memperbaiki mutu atau kualitas hidup manusia (Poerwoko, 2015:203).

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu pertama, menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat (*enabling*). Setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga upaya pemberdayaan ditujukan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata dan lebih positif seperti upaya peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunity*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi yang berarti dalam proses pemberdayaan harus dicegah pihak yang lemah menjadi bertambah lemah. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak

seimbang serta eksploitasi terhadap pihak yang lemah oleh pihak yang kuat (Poerwoko, 2015:203).

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pemberdayaan diatas maka dapat dilihat indikator dalam mengukur pemberdayaan, yaitu Nugroho dalam (Iswadi, 2019:23):

- a) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- b) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- c) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut.
- d) Manfaat, yaitu masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara

Beberapa manfaat pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam antara lain membantu mengurangi kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan, dan mengatasi konflik pengolahan sumber daya di antara para pihak yang berkepentingan.

#### **a. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ikan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di

pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Wijaya & Fauzie, 2020:8).

Masyarakat nelayan bukan hanya mereka yang mengatur kehidupannya hanya bekerja dan mencari di laut, melainkan mereka yang juga tinggal disekitar pantai walaupun mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan berdagang.

Masyarakat nelayan adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya (Trisnani, 2016:4).

Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia. Nelayan sebuah sebutan diberikan kepada kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, dengan aktivitas mengeksploitasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan perairan yang bersifat milik semua orang (*common goods*) sebagai poros tumpu kehidupan sangat ditentukan oleh musim,

rentan terhadap degradasi ekosistem, dan gejolak sosial ekonomi (Soeriadiredja, 2019:38).

Biasanya masyarakat nelayan dibagi dalam kelompok sesuai dengan posisinya dalam 3 kelompok (Suarnadwipa, 2018:107):

- 1) Nelayan juragan, yaitu nelayan pemilik alat lengkap, perahu yang dioperasikan oleh orang lain.
- 2) Nelayan buruh, yaitu nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- 3) Nelayan perorangan, yaitu nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka di laut. Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Soeriadiredja, 2019:39).

Kondisi lain yang turut memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak sepantasnya jika mengatakan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika terjadi masa paceklik, pada akhirnya mereka

berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi mereka (Irianto, 2008:153).

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan menurut terdapat lima masalah pokok antara lain (Irianto, 2008:155):

- 1) Kondisi Alam. Kompleksnya permasalahan pada masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.
- 2) Tingkat pendidikan nelayan. Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumberdaya manusia rendah dan tingkat produktivitas tangkapannya juga sangat rendah.
- 3) Pola kehidupan nelayan. Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.
- 4) Pemasaran hasil tangkapan. Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar.
- 5) Program pemerintah yang belum memihak pada masyarakat nelayan.

Pemberdayaan diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengolahan sumberdaya laut dan pesisir. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk (Irianto, 2008:154).

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosia-budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir (Effendi, 2019:76).

Tujuan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik jika terjadi interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengolahan sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan. Beberapa dasar filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut (Kusnadi, 2007):

- a. Potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua pihak serta

dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosialbudaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.

- b. Pengolahan potensi sumberdaya alam pesisir dan dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati, berorientasi pada kepentingan masa depan. Serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT dan generasi penerus mereka.
- c. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat dikawasan pesisir.
- d. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.
- e. Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam dari berbagai ancaman.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan akan mampu mencapai tujuan secara optimal jika masyarakat membuka diri terhadap partisipasi pihak-pihak lain, seperti swasta, LSM, atau perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kawasan pesisir. Dalam kerja sama antara pihak ini, yang harus dipegang teguh oleh masyarakat adalah prinsip-prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, saling menghormati, serta dapat membawa arus perubahan

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya (Prayogo, 2014:24).

Merujuk pada tujuan dari pemberdayaan mewujudkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Maka indikator untuk mengukur kegiatan pemberdayaan yaitu (Dahlia, 2019:53):

- 1) Penguatan Pendanaan, khusus untuk industri pengolahan ikan pemerintah juga memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, dan murah serta memberikan kemudahan dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Mendorong pemasaran hasil perikanan, peran pemerintah daerah dalam pemasaran hasil produksi Usaha kecil menengah khususnya dinas koperasi perindustriaan dan perdagangan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk mempromosikan hasil produk usahanya baik di daerah maupun di tingkat provinsi melaksanakan suatu pameran hasil usaha, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di satu daerah saja tetapi dapat juga di kenal daerah lain atau provinsi lain.

3) Membantu sarana dan prasarana, dalam melakukan optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan pemerintah selaku agen pemberdayaan melengkapi masyarakat atau kelompok usaha dengan fasilitas serta alat yang mendukung dalam proses pengelolaan perikanan.

4) Pemberian pembinaan dan Pelatihan, untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pengelolaan ikan, pelatihan dan pengembangan sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan keterampilan para pelaku pengelola perikanan yang dianggap belum mampu untuk mengelola hasil tangkapan ikan karena faktor perkembangan kebutuhan masyarakat.

Agar skala pencapaian pemberdayaan cukup signifikan maka basis pemberdayaan pada masyarakat di kawasan pesisir adalah keluarga atau rumah tangga. Penguatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada unit-unit terkecil dalam kehidupan masyarakat ini diharapkan akan memperkuat integrasi sosial dan komitmen kolektif terhadap pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

#### **b. Pengolahan Hasil Perikanan**

Ikan merupakan makanan manusia yang paling utama sejak awal abad dari sejarah manusia. Daging ikan banyak mengandung protein dan lemak, seperti juga pada daging-daging hewan ternak. Daging ikan mudah dicerna dibandingkan tumbuh-tumbuhan. Ikan banyak mengandung unsur organik dan anorganik, yang berguna bagi manusia. Ikan perlu ditangani

dengan baik agar tetap dalam kondisi yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Namun ikan juga cepat mengalami proses pembusukan setelah ditangkap dan mati. Hal itu disebabkan ikan memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga dengan cepat mengalami pembusukan (Reza, 2020:127).

Ikan adalah salah satu jenis hasil perikanan. Hasil perikanan adalah semua yang hidup di lingkungan perairan baik laut, waduk, sungai, kolam, tambak, dan perairan lain. Makhluk yang berada di perairan antara lain: ikan, udang-udangan, kerang-kerangan, molusca, serta tumbuh-tumbuhan seperti alga rumput laut dan sebagainya (Yusra, 2019:100).

Kelebihan produk perikanan yaitu mengandung protein yang cukup tinggi (20%) dalam tubuh ikan, protein juga berfungsi sebagai bahan bakar didalam tubuh. Winarno dalam (Yusra, 2019:102). Protein pada ikan mengandung komposisi asam amino yang diperlukan oleh tubuh manusia, selain itu di dalam ikan terdapat asam-asam lemak tak jenuh esensial serta zat gizi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh serta sumber vitamin, terutama vitamin A dan sumber mineral seperti zat besi, iodium, seng, selenium dan kalsium yang semuanya erat kaitannya dengan defisiensi dari zat gizi mikro.

Ikan bergizi tinggi karena didalam ikan terkandung senyawa-senyawa yang sangat berguna bagi manusia seperti protein, lemak, sedikit karbohidrat, vitamin dan garam-garam mineral. Komponen protein pada ikan terbesar setelah air. Oleh sebab itu ikan merupakan sumber protein

hewani yang sangat potensial. Protein ikan sangat di butuhkan oleh manusia karena lebih mudah cerna dan menganung asam amino essensial dan non essensial yang di perlukan oleh tubuh manusia (Diniarti, 2020:50).

Pada dasarnya cara pengolahan yang umum dilakukan dibagi menjadi empat golongan yakni (Diniarti, 2020:52):

- 1) Pengolahan dengan memanfaatkan faktor fisikawi, merupakan pengolahan yang memanfaatkan suhu tinggi atau suhu rendah. Suhu tinggi dalam hal ini digunakan untuk membunuh mikroba kontaminasi yang terdapat pada ikan sekaligus menghentikan aktivitas enzim dalam daging ikan. Misalnya saja dalam proses pengeringan, pengasapan, dan proses sterilisasi yang biasa dilakukan dalam pengalengan ikan.
- 2) Pengolahan dengan bahan pengawet, seperti yang dilakukan dalam proses penggaraman, perendaman dalam larutan asam, dan lain-lain.
- 3) Pengolahan yang memanfaatkan factor fisikawi dan bahan pengawet, Pengolahan yang memanfaatkan kedua metode diatas atau kombinasi antara pengolahan secara fisikawi dengan pengolahan yang menggunakan bahan pengawet ditujukan untuk lebih meningkatkan mutu dari pengolahan yang dilakukan.
- 4) Pengolahan dengan cara fermentasi, pengolahan yang bersifat mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan memiliki sifat-sifat berbeda dari keadaan semula. Contoh pengolahan dengan

cara fermentasi adalah pembuatan terasi, tepung ikan, kecap ikan, dan lain-lain.

Pada dasarnya perikanan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu produksi, penanganan dan pengolahan (handling and processing) serta pemasaran. Tahap akhir dari kegiatan perikanan adalah penanganan. Ikan hasil penangkapan atau pemanenan harus segera ditangani untuk menghambat penurunan kualitas. Tahapan awal penanganan hasil perikanan dilakukan di atas kapal perikanan pada saat proses penangkapan dan selanjutnya dilakukan pembongkaran hasil tangkapan di pelabuhan perikanan dan pelelangan di tempat pelelangan ikan. Tahapan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan titik kritis awal yang harus di perhatikan sebaik mungkin untuk menjamin sebanyak mungkin produk perikanan yang akan didistribusikan agar tetap mempunyai mutu yang baik. Namun disatu sisi pelaku usaha terutama nelayan belum memikirkan apakah upaya yang dilakukan sudah benar, baik secara teknis maupun ekonomis.

Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional terutama dalam penyediaan lapangan kerja (padat karya), sumber pendapatan bagi nelayan, sumber protein hewani dan sumber devisa bagi negara. Hasil tangkapan ikan harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan pemanfaatan produksi hasil tangkapan laut adalah dengan pengembangan produk bernilai tambah, baik olahan tradisional maupun modern. Namun produk bernilai tambah yang diproduksi di

Indonesia masih dari ikan ekonomis seperti tuna/udang kaleng, tuna steak, loin dan lain sebagainya yang memiliki nilai jual meski tanpa dilakukan proses lanjutan. Sedangkan apabila ingin merubah nilai jual ikan non ekonomis maka salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui teknologi produk perikanan (pengembangan produk olahan hasil perikanan) agar lebih bisa diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan selera pasar dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, aman, sehat melalui asupan gizi/vitamin/protein dari produk hasil perikanan dan ketahanan pangan (Cahyandi, 2021:89).

Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi para nelayan petani ikan, sumber protein hewani yang bernilai gizi tinggi, serta sumber devisa yang sangat potensial. Dengan kandungan lokal yang sangat tinggi, volume ekspor produk perikanan hampir tidak terpengaruh oleh dampak krisis moneter bahkan cenderung menunjukkan laju peningkatan. Industri pengolahan hasil perikanan merupakan suatu kegiatan perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan perikanan lainnya, produksi penangkapan dan budidaya dan pemasaran dengan tujuan penyediaan pangan dan non-pangan. Industri ini merupakan suatu kegiatan yang memberikan nilai tambah dari hasil kegiatan penangkapan dan budidaya. Oleh karena itu pengembangan industri pengolahan hasil perikanan mempunyai nilai yang strategis bagi pengembangan industri

perikanan, dapat memberikan manfaat finansial maupun ekonomi (Adawyah, 2007:39).

Industri pengolahan perikanan adalah usaha pengolahan hasil perikanan/organisme yang hidup di air untuk tujuan komersial/ industri baik hasil budidaya maupun hasil tangkap (Yuliasni, 2019:126). Usaha pengolahan ikan merupakan istilah umum yang mendefinisikan penanganan pasca produksi tangkapan atau panen budidaya menggunakan sarana prasarana dan teknologi. Pengolahan perikanan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produk perikanan dan berfungsi untuk mengawetkan ikan karena bersifat mudah rusak dan busuk.

Industri pengolahan perikanan dilakukan sesuai dengan jenis komoditas ikan serta selera konsumen. Secara teknik industri pengolahan perikanan terbagi menjadi industri pengolahan tradisional dan modern. Industri pengolahan perikanan tradisional seperti pemanggangan, pemindangan, pengeringan, pengasinan dan pengolahan lain menggunakan peralatan dan teknik sederhana. Sementara industri pengolahan perikanan modern seperti pembekuan, pengalengan dan diversifikasi olahan lain yang telah menggunakan inovasi teknologi (Reza, 2020:128).

Dirjen Perikanan menyebutkan karakteristik dari pengolahan ikan tradisional, antara lain (Afrianti, 2013:64):

- 1) Kemampuan pengetahuan pengolah rendah dengan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun.

- 2) Tingkat sanitasi dan higienis rendah, sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitarnya yang umumnya tidak memiliki sarana air bersih.
- 3) Permodalannya sangat lemah.
- 4) Peralatan yang digunakan sangat sederhana.
- 5) Pemasaran produk hanya terbatas pada pasaran lokal.

Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam industri pengolahan perikanan mutlak diperlukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengingat skala industri pengolahan perikanan di daerah berskala IKM, pola kemitraan yang dapat dilakukan dalam industri pengolahan perikanan sesuai dengan undang-undang tersebut adalah pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, keagenan, bagi hasil, perdagangan umum, dan kemitraan lainnya.

Pengasinan atau penggaraman dalam mengawetkan ikan merupakan cara yang terbanyak dilakukan. Tujuannya adalah agar kandungan air dalam daging ikan terserap sehingga aktivitas mikroorganisme (bakteri pembusuk) dapat terhenti. Selain itu, larutan garam juga dapat menyebabkan osmose pada sel-sel mikroorganisme yang menjadikan kurangnya kadar air pada sel bakteri. Dengan begitu bakteri akan mati. Saat ini belum banyak yang berminat mengembangkan usaha pengolahan ikan asin secara tradisional tersebut untuk diekspor. Pengolahan yang ada saat ini masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga potensi pasar ekspor hasil olahan ikan asin tradisional belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun kenyataannya

produksi ikan asin menurun, penyebabnya antara lain : musim, kenaikan harga ikan segar, dan kenaikan BBM (Afrianti, 2013:60).

### C. Kerangka Pikir

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat bernisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Di sisi lain, salah satu kata kunci pada saat ini yang sering didengungkan oleh semua lapisan masyarakat adalah kata peningkatan sumberdaya manusia. Kata tersebut mempunyai makna lebih spesifik lagi menyangkut bagaimana mengangkat kondisi masyarakat yang ada menjadi lebih baik dimasa mendatang.

Hasil pengolahan perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru jika dapat dimanfaatkan secara baik maka akan memberikan tingkat kesejahteraan secara ekonomi bagi masyarakat. Tentu dalam pengolahan hasil perikanan membutuhkan bantuan dari pemerintah melalui program-program pengembangan sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam mengukur kegiatan pemberdayaan berdasarkan teori (Dahlia, 2019) dapat dilihat dengan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

**Gambar 3.1.****Bagan Kerangka Pikir****D. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian terkait pemberdayaan masyarakat yaitu: pendanaan, mendorong pemasaran, membantu sarana dan prasarana dan pemberian pembinaan dan pelatihan dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru.

**E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan maka yang menjadi gambaran dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Penguatan Pendanaan adalah bantuan dana kepada pengolahan penangkapan ikan kepada para pelaku usaha sesuai dengan ketentuan di Pemerintahan Kabupaten Barru.
2. Mendorong hasil pengolahan ikan adalah keterlibatan pemerintah Kabupaten Barru dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat yang berasal dari pengolahan ikan termasuk pada kegiatan pemasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
3. Membantu sarana dan prasarana adalah pemerintah Kabupaten Barru lebih meningkatkan bantuan peralatan yang digunakan masyarakat dalam pengolahan hasil ikan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.
4. Pemberiaan pembinaan dan pelatihan adalah bentuk kegiatan pemerintah Kabupaten Barru yang meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat dalam pengolahan ikan sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama dua bulan, dari bulan April sampai bulan juni 2022. Terhitung mulai tanggal 06 april sampai dengan 06 juni 2022. Penelitian ini menetapkan tempat penelitian di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena data ataupun dokumen-dokumen sesuai dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru, yang berfokus terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan, dapat diperoleh di lokasi tersebut.

### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru adalah :

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Landasan teori dimanfaatkan

sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan (Sugiyono, 2017). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

## 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti observasi, dan dokumentasi.

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya pemerintah dan masyarakat yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Informan Penelitian

| NO | NAMA   | JABATAN                                             | INISIAL |
|----|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| 1  | Misbah | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru | Mb      |
| 2  | Awal   | Kepala Dinas Koprindag Kabupaten Barru              | Aw      |
| 3  | Rabia  | Pelaku industry pengolahan Ikan                     | Rb      |
| 4  | Sukma  | Pelaku industry pengolahan Ikan                     | Sk      |
| 5  | Darwis | Nelayan                                             | Dw      |

Sumber, Hasil Olahan Penulis

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau

informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

#### **G. Keabsahan Data**

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas yang diperoleh. Pengembangan validitas yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain. Menggali suatu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tempat)



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Profil Kabupaten Barru**

Kabupaten Barru yang dikenal dengan Motto Daerah HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: – Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap – Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone – Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan – Sebelah Barat dengan Selat Makassar. Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans sulawesi dan merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare.

##### **2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis terletak diantara koordinat  $4^{\circ}05'35''$  -  $4^{\circ}47'35''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}35'00''$  -  $119^{\circ}49'16''$  Bujur Timur dengan luas wilayah  $1.174,72 \text{ km}^2$  (117.472 Ha) dan berada  $\pm 102 \text{ km}$  disebelah utara

Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat  $\pm 2,5$  jam. Kabupaten Barru berada di antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans sulawesi.

### 3. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah daerah Kabupaten Barru diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru.

#### a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor pertanian sangat berpengaruh dalam hal penyediaan bahan pangan, penganekaragaman menu makanan, dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu di Kabupaten Barru pada saat ini dalam rangka untuk meningkatkan produksi pertanian telah dilaksanakan Program Pembinaan dan Produksi Pertanian, program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu produksi komoditi Pertanian, kegiatan yang dilakukan dalam program ini meliputi :

1. Pengembangan Budidaya dan Peningkatan Mutu Produksi Tanaman Pertanian dan Perkebunan.
2. Pengembangan Benih Komoditi Unggulan.
3. Pembinaan Sumberdaya Pertanian dan Perkebunan.
4. Pengembangan Instalasi Kebun Benih. Dari keempat kegiatan tersebut selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat juga merupakan potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

b. Kehutanan

Peranan hutan erat hubungannya dengan perkembangan industri sebagai dimensi baru dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Saat ini, hutan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sumber diperolehnya tanah pertanian baru, melainkan sebagai sumber bahan mentah untuk industri, misalnya kayu, damar dan rotan. Hutan di Kabupaten Barru terdiri dari Hutan Lindung 51.266,02 Ha dan Hutan Produksi Terbatas 17.290,03 Ha total luas hutan 68.556,05 Ha. Hutan Produksi Terbatas dapat dikembangkan sebagai salah satu areal budidaya tanaman kehutanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dengan luas areal yang tersedia, peluang yang dapat dikembangkan adalah Hutan Tanaman Industri dengan tanaman pohon Pinus, Kemiri, Jati dan Rotan.

Penyebaran jenis tanaman jati dapat ditemui disetiap kecamatan di Kabupaten Barru dengan tingkat persentasi diatas 30 persen. Jati rakyat dengan sentra produksi meliputi Kecamatan Barru, Mallusetasi, Pujananting, Tanete Riaja, Tanete Rilau, Soppeng Riaja dan Balusu dengan potensi produksi 2.928,66 m<sup>3</sup> dengan luas areal 4.954 Ha. Tanaman rotan sentra produksi berada di Kecamatan Pujananting dan Soppeng Riaja dengan potensi 20 ton/tahun pada areal seluas 900 Ha; Tanaman kemiri di Kecamatan Soppeng Riaja dan Balusu dengan luas 2.280 Ha dengan produksi 876,05 ton/tahun dan

tanaman pinus di Kecamatan Pujananting luas lahan 200 Ha dengan produksi 30 ton.

Sutera alam dapat dikembangkan di Kecamatan Barru, Balusu dan Soppeng Riaja dengan areal yang tersedia 500 Ha. Areal yang telah dikembangkan seluas 25 Ha dengan produksi Kokon 1.021 Kg dan produksi Benang 129,5 Kg.

c. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan, Kabupaten Barru sangat potensial dalam bidang Perikanan/Perairan. Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Garis pantainya sepanjang 78 Km membentang di Wilayah Barat Kabupaten, menghadap ke Selat Makassar. Berbagai budidaya laut berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten ini. Budidaya keramba jaring apung yang menghasilkan Bandeng dan Nila Merah di Kecamatan Mallusetasi, Kerang Mutiara di Pulau Pannikiang, sementara di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja dan Mallusetasi dapat dikembangkan budidaya Rumput Laut, Kepiting dan Teripang. Sedangkan budidaya Kerangkerangan juga dikembangkan di Kecamatan Balusu, Barru dan Mallusetasi.

Dari sisi komoditas andalan pada Sub Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Barru dari beberapa jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi tetap dikembangkan diantaranya Rumput laut, Bandeng, Kerapu, dan Udang Windu. Sementara itu

Kabupaten Barru memiliki gugusan pulau-pulau kecil untuk budidaya berbagai jenis komoditi perikanan. Pulau-pulau dimaksud adalah Pulau Panikiang, Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pulau Batukalasi, Pulau Puteangin, Pulau Uming dan Pulau Anakuming.

## **B. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru**

Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan (Hikmah, 2010).

### **1. Penguatan Pendanaan**

Penguatan pendanaan merupakan bantuan dana yang diberikan Pemerintah kepada para pelaku dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan. Kutipan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Dinas Kelautan dan perikanan terkait penguatan pendanaan dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

"Dalam hal pemberdayaan, di butuhkan yang namanya dana untuk membiayai proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan yang di Kabupaten Barru. Dalam hal pendanaan,

pemerintah daerah dalam hal ini dinas perikanan dan terkhusus yang membidangi pemberdayaan masyarakat nelayan terbagi menjadi 2 yakni dalam bentuk fisik seperti dukungan sarana dan prasarana perikanan bagi nelayan, selain itu dalam bentuk non fisik seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya nelayan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan nelayan, bimtek, penyuluhan. Selain itu kemitraan usaha, dukungan kelembagaan dan lain-lain. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat nelayan yang diamanatkan sesuai peraturan yang berlaku yakni menciptakan SDM nelayan yang unggul dan berkualitas. (Wawancara, 20 April 2022).

Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Dinas Koprindag Kabupaten Barru, dalam wawancaranya terkait penguatan pendanaan dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan, adalah sebagai berikut :

“Dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan, banyak hal yang ditempuh oleh pemerintah terutama dalam hal pemberian dana bantuan kepada masyarakat nelayan yang di lakukan pemberdayaan. Pemerintah berperang Sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. (Wawancara, 21 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah memiliki peran penting dalam hal pemberian fasilitas kepada masyarakat nelayan. Terkait dengan fasilitas yang di berikan, pemerintah berkewajiban untuk memberikan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Pada pasal tersebut hanya menyebutkan urusan pemerintahan bidang kelautan. Namun dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan digabung menjadi satu yang dalam hal ini terdapat kewenangan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan tempat pelelangan ikan, penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan pemberdayaan usaha kecil pembudi daya ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hikmat (2006), mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat merupakan salah satu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan antara lain bermakna bahwa suatu masyarakat tersebut menjadi bagian dari pelaku pembangunan itu sendiri. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain bagaimana suatu inovasi yang lebih maju dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana budaya lokal (termasuk kearifan lokal), bagaimana pula mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan tersebut.

Atas dasar uraian di atas, pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan

dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai keajahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (*bergaining position*) mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan.

Unsur-unsur kemandirian masyarakat tersebut ditentukan oleh kemampuan ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangunan, dan memegang teguh prinsip-prinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan tata kehidupan yang lebih baik (Kusnadi 2009). Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barru, terkait pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Pemberdayaan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan seperti kemiskinan dan lemahnya kualitas SDM nelayan. Kegiatan pemberdayaan tidak boleh dilaksanakan secara parsial, tetapi seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga arah pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran tujuan yang ditetapkan, dengan melibatkan semua pihak dalam memberdayakan masyarakat nelayan maka dapat mempermudah program-program terlaksana dengan baik.”  
(Wawancara, 20 April 2022)

Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subyek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomiyang dinamis. Program pemberdayaan harus bisa mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan (Satria 2001). Kemandirian masyarakat nelayan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan. Tanpa

kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial. Wawancara bersama Kepala Dinas Koprindag Kabupaten Barru, terkait pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas atau pelaksana teknis terkait pemberdayaan nelayan seperti dinas perikanan dan kelautan. Selain itu, melalui forum musrembang maupun prakarsa pemerintah daerah, kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan merupakan salah satu usulan masyarakat yang selalu diusulkan dan direncanakan setiap tahunnya. (Wawancara, 21 April 2022)

Dari penjelasan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah dapat melibatkan partisipasi masyarakat sekitar kawasan perikanan dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat nelayan dan meningkatkan kesejahteraannya, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang dimilikinya. Kawasan perikanan sebagai sebuah sistem tidak dibatasi oleh batasan-batasan administratif, tetapi lebih pada skala ekonomi dan ekologi yang melingkupi kawasan tersebut sesuai dengan pola interaksi ekonomi dan ekologinya. Pengembangan kawasan ini memerlukan penataan ruang yang menyeluruh yang mencakup pengaturan, perencanaan, pengelolaan dan penertiban kembali penataan ruang.

Khusus untuk industri pengolahan ikan pemerintah juga memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, dan murah serta memberikan kemudahan dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan. Seperti yang di katakan oleh kepala bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru terkait penguatan pendanaan dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kami dari dinas kelautan dan perikanan juga mempunyai peranan membantu dalam memberikan bantuan penguatan modal bagi pengusaha pengolahan ikan yaitu dengan memberikan dana yang dapat diambil dari koprasi dengan bunga yang rendah jadi pelaku usaha yang sedang memenuhi ketentuan dapat langsung ke koprasi untuk memperoleh bantuan dana” (Wawancara Tgl 20 April 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk pembiayaan usaha kecil menengah khususnya industri pengolahan ikan diberikan akses yang mudah untuk memperoleh bantuan diantaranya melalui penguatan modal usaha yang merupakan salah satu tahap dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Untuk mempermudah pengembangan usaha pengolahan ikan ini pemerintah memberikan bantuan modal, kredit lunak, dan kemudahan dalam memperoleh pendanaan melalui bank-bank pelaksana yang telah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Koprasi Perindustriaan dan Perdagangan. Selain itu lembaga pencairan modal lainnya non bank adalah koprasi yang juga memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan bunga yang rendah melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi dari kedua Dinas tersebut pemerintah daerah memberikan akses yang mudah bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah untuk memperoleh modal usaha dan juga bantuan modal untuk mengembangkan usahanya dengan prosedur yang mudah.

Berdasarkan pengamatan di lapangan salah seorang pelaku usaha industri pengolahan ikan dalam wawancaranya terkait penguatan pendanaan dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Saya pernah memperoleh bantuan dana sebesar 10 juta untuk kelompok usaha kami mengajukan proposal kepada dinas kelautan dan perikanan untuk membeli alat tempat pengeringan ikan dan mesin kapal walaupun pencairan dana lama baru keluar tetapi sangat berguna bagi kami” (Wawancara Tgl 23 April 2022)

Dari beberapa hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa Bantuan pendanaan untuk industri perikanan cukup memberikan ruang kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya karena untuk mendapatkan dana bantuan pemerintah memfasilitasi dan memediasi bantuan pendanaan untuk para pelaku usaha pengolahan ikan melalui kerjasama dengan bank pelaksana dan koprasa yang ditunjuk pemerintah dalam pendanaan bagi para pelaku usaha. Kesempatan inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha pengolahan ikan tetapi berdasarkan pengamatan dilapangan hanya sebagian kecil pelaku usaha pengolahan ikan yang memanfaatkan bantuan pendanaan dan permodalan tersebut.

## **2. Mendorong Pemasaran**

Mendorong hasil pengolahan ikan adalah keterlibatan pemerintah Kabupaten Barru dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat yang berasal dari pengolahan ikan termasuk pada kegiatan pemasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wawancara yang dilakukan bersama dengan pelaku industry pemberdayaan nelayan dalam wawancaranya terkait mendorong

pemasaran dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Dalam hal pemasaran hasil olahan ikan oleh nelayan, pemerintah menjalin kerja sama atau yang biasa di sebut dengan kemitraan usaha, dimana terjalin kerjasama antara pengusaha kecil dan dengan pengusaha menengah/besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. (Wawancara Tgl 23 April 2022)

Kemitraan usaha merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam memberdayakan nelayan di Kabupaten Barru. Kemitraan usaha. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha perikanan Kemitraan dilakukan dalam bentuk: praproduksi; produksi; pascaproduksi; pengolahan; pemasaran; Dan pengembangan. Kemitraan Nelayan Kecil dapat dilakukan dengan pengolah atau pemasar ikan, nelayan atau pembudidaya ikan, koperasi perikanan, pelaku usaha perikanan atau nonperikanan, lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan swasta. Adapun hasil wawancara dari Kepala Dinas Koprindag Kabupaten Barru, dalam wawancaranya terkait dengan mendorong pemasaran dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Untuk mencapai peningkatan kemampuan usaha kecil menjadi mandiri dan tangguh dalam kaitannya dengan pemberdayaan, kemitraan yang dilakukan kepada nelayan kecil, menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi hal tersebut. Kemitraan yang dimaksud dalam usaha perikanan adalah memberikan jalan, kesempatan serta peluang pemasaran, permodalan, peningkatan sumber dayamanusia serta teknologi

kepada nelayan dan pembudi daya ikan. (Wawancara tgl 20 April 2022)”

Mengingat besarnya potensi hasil tangkapan ikan Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru yang besar, serta besarnya peluang memberdayakan nelayan beserta keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan tangkap dan pengelola hasil tangkapan. Maka dibutuhkan terobosan dan inovasi kelembagaan yang dapat memberi insentif bagi para pelaku dan pihak-pihak terkait di bidang perikanan tangkap. Salah satunya adalah dengan mengembangkan model kemitraan usaha bagi nelayan dengan lembaga keuangan. Pola kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi ataupun menyelesaikan masalah modal yang selama ini menjadi kendala yang biasa dihadapi nelayan. Berikut kutipan wawancara bersama Pelaku Industri, terkait mendorong pemasaran dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan. Dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Untuk membantu pemasaran produk ukm kami memfasilitasi dan mengundang pelaku industri untuk mempromosikan produk-produk unggulan daerah termasuk abon ikan dalam pameran di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi hal ini dapat membantu pelaku ukm dalam memperkenalkan jenis produknya”(Wawancara Tgl 23 April 2022)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru, terkait dengan mendorong pemasaran dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan dalam wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Pemerintah membantu mendukung promosi usaha kecil menengah termasuk usaha industry perikanan. Pemasaran merupakan

tanggung jawab bersama antara pelaku usaha dan pemerintah daerah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pengemasan produk yang dihasilkan sebelum produk tersebut dipasarkan. Bentuk kemasan dapat menarik minat konsumen sehingga perlu diadakan pelatihan pembuatan kemasan yang menarik dan kemudian dukungan promosi produk Usaha kecil menengah, melalui pameran, akan dapat membantu memperluas jaringan pemasaran, dan distribusi.” (Wawancara Tgl 20 April 2022).

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membuka kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan kecil, dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pelaku usaha, pemilik kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi berbagai produk dan hasil tangkapan nelayan dengan memberikan informasi dan keahlian memperlakukan hasil tangkapan juga produk olahan hasil tangkapan, serta menjembatani pelaku usaha dengan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam usaha-usaha pemasarannya. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses permodalan demi peningkatan produktivitas usaha nelayan.

### **3. Membantu Sarana Dan Prasarana**

Membantu sarana dan prasarana adalah pemerintah Kabupaten Barru lebih meningkatkan bantuan peralatan yang digunakan masyarakat dalam pengolahan hasil ikan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

Untuk industri pengeringan ikan atau pengasinan ikan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan berupa sarana tempat pengeringan ikan atau yang lebih di kenal masyarakat Sumpang Binangae dengan istilah Para-para tempat penyimpanan ikan yang akan dikeringkan berbentuk segi panjang yang terbuat dari kayu atau bambu

dan jaring yang dapat memuat ikan dalam jumlah banyak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan salah seorang nelayan, terkait sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan adalah sebagai berikut :

“Pemerintah pernah memberikan kita bantuan berupa alat pembuatan para-para tetapi kayu yang diberikan terlalu berat untuk diangkat sementara kalau turun hujan ikan harus cepat dipindahkan jadi kayu tersebut kami ganti dengan bambu agar ringan mengankannya sedangkan kayu yang diberikan itu kami gunakan untuk tempat duduk” (Wawancara tgl 25 April 2022)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang nelayan, dalam wawancanya terkait dengan membantu sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan, adalah sebagai berikut :

“Pemerintah memberikan kami bantuan yaitu pengering ikan, dibagikan ke setiap-setiap warga kami simpang di depan rumah kami buat menjadi bara-bara. Ikan yang kami tangkap kami bersihkan setelah itu di jemur di bara-bara. Sedangkan untuk pembuatan abon ikan pemerintah juga memberikan kami alatnya untuk mempermudah dalam membersihkan ikan banden, menghaluskan ikan, hingga proses pengemasan” (Wawancara tgl 25 April 2022)

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis lapangan menunjukkan bahwa pemberian bantuan sarana usaha untuk pelaku usaha industri pengolahan abon ikan sangat baik dan efektif karena sarana yang diberikan betul-betul dimanfaatkan dengan baik hal ini didukung oleh pengadaan pembinaan dan pelatihan. Berbeda halnya dengan pelaku usaha pengeringan ikan yang kurang efektif untuk pemberian sarana tempat pengeringannya karena kayu yang digunakan dirasakan oleh pelaku usaha tidak sesuai untuk digunakan sebagai tempat pengeringan ikan terlalu berat sehingga sedikit menyulitkan proses pemindahan jika cuaca kurang mendukung.

#### 4. Pemberian Pembinaan dan Pelatihan

Pemberiaan pembinaan dan pelatihan adalah bentuk kegiatan pemerintah Kabupaten Barru yang meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat dalam pengolahan ikan sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar.

Dalam melakukan pembinaan pemerintah daerah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan memfasilitasi sejumlah pelaku usaha pengolahan ikan dan masyarakat nelayan untuk mengikuti berbagai pelatihan pengolahan hasil perikanan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan pelaku industry dalam wawancaranya terkait dengan pemberian pembinaan dan pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan adalah sebagai berikut :

“Pelatihan yang di lakukan dalam pemberdayaan adalah pelatihan pembuatan abon ikan. Mulai dari proses pembuatan, pengemasan, hingga proses penjualan. Sebelum adanya pelatihan tersebut, kami masyarakat hanya bisa membuat abon untuk kebutuhan keluarga tidak untuk di jadikan usaha. Setelah adanya pemberdayaan, kami merasa terbantu, karena kami memiliki kegiatan yang profuktif yang berpenghasilan”(Wawancara tgl 23 April 2022).

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan dan wawancara dengan para pelaku usaha pengolahan ikan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terkhusus untuk industri pengolahan ikan hanya menyentuh usaha pengolahan ikan abon saja hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh kepala bidang pemasaran dan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru, terkait dengan pemberian pembinaan dan pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan hasil tangkapan ikan, adalah sebagai berikut :

“Untuk masyarakat yang mengembangkan usaha pengolahan ikan kami akan melakukan kunjungan teknis ketempat pengolahan ikan kemudian setelah itu kami melakukan pembinaan secara bertahap kemudian barulah kami memfasilitasi untuk pengadaan sarana usaha dan alat-alat yang dibutuhkan, setelah itu kami dapat memberikan bantuan penguatan modal untuk pengembangan usaha” (Wawancara Tgl 20 April 2022)

Dari hasil wawancara di atas penulis berpendapat bahwa pembinaan usaha memang seharusnya untuk pelaku usaha yang memiliki keseriusan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan betul-betul berproduksi agar hasil dari pembinaan ini tidak hanya asal melakukan pembinaan saja tetapi menghasilkan sebuah *output* usaha yang memberikan nilai tambah ekonomis bagi masyarakat dan dapat membuka lapangan kerja.

### C. Pembahasan

#### 1. Penguatan Pendanaan

Menurut (Carl I Friendrick dalam Nugroho 2004), yang dimaksud dengan penguatan pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan berasal. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari Masyarakat itu sendiri. Sedangkan sumber dana pinjaman adalah sumber dana yang berasal dari luar kegiatan operasional seperti hutang kepada kreditur.

Penguatan dana merupakan bantuan dana yang di berikan Pemerintah kepada pelaku usaha pengelolaan hasil penangkapan ikan.

Dalam hal pemberdayaan, dana yang di gunakan dalam pengelolaan hasil tangkapan ikan yang di lakukan oleh masyarakat berasal dari Pemerintah

Kabupaten Barru. Untuk pembiayaan pelatihan pemberdayaan berasal dari Pemerintah, berupa uang serta fasilitas penjunjang lainnya. Sedangkan untuk usaha kecil menengah khususnya industri pengolahan ikan di berikan akses yang mudah untuk memperoleh bantuan diantaranya melalui penguatan modal usaha yang merupakan salah satu tahap dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Untuk mempermudah pengembangan usaha pengolahan ikan ini pemerintah memberikan bantuan modal, kredit lunak, dan kemudahan dalam memperoleh pendanaan melalui bank-bank pelaksana yang telah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Koprasi Perindustriaan dan Perdagangan. Selain itu lembaga pencairan modal lainnya non bank adalah koprasi yang juga memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan bunga yang rendah melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi dari kedua Dinas tersebut pemerintah daerah memberikan akses yang mudah bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah untuk memperoleh modal usaha dan juga bantuan modal untuk mengembangkan usahanya dengan prosedur yang mudah.

## 2. Mendorong Pemasaran

Menurut Fandy Tjiptono, 2010 mendorong pemasaran dilakukan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau meningkatkan pasar sasaran atas produknya agar masyarakat bisa menerima, membeli dan juga loyal pada produk yang ditawarkan.

Mendorong hasil pengolahan ikan adalah keterlibatan pemerintah Kabupaten Barru dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat yang berasal

dari pengolahan ikan termasuk pada kegiatan pemasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membuka kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan kecil dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pelaku usaha, pemilik kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi berbagai produk dan hasil tangkapan nelayan dengan memberikan informasi dan keahlian memperlakukan hasil tangkapan juga produk olahan hasil tangkapan, serta menjembatani pelaku usaha dengan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam usaha-usaha pemasarannya. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses permodalan demi peningkatan produktifitas usaha nelayan.

### 3. Membantu Sarana Dan Prasarana

Menurut Dahlia, 2019 membantu sarana dan prasarana dalam melakukan optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan pemerintah selaku agen pemberdayaan melengkapi masyarakat atau kelompok usaha dengan fasilitas serta alat yang mendukung dalam proses pegelolaan perikanan.

Membantu sarana dan prasarana adalah pemerintah Kabupaten Barru lebih meningkatkan bantuan peralatan yang digunakan masyarakat dalam pengolahan hasil ikan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

Untuk industri pengeringan ikan atau pengasinan ikan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan

berupa sarana tempat pengeringan ikan atau yang lebih di kenal masyarakat Sumpang Binangae dengan istilah Para-para tempat penyimpanan ikan yang akan dikeringkan berbentuk segi panjang yang terbuat dari kayu atau bambu dan jaring yang dapat memuat ikan dalam jumlah banyak.

#### 4. Pemberian Pembinaan dan Pelatihan

Pemberiaan pembinaan dan pelatihan adalah bentuk kegiatan pemerintah Kabupaten Barru yang meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat dalam pengolahan ikan sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar.

Menurut Dahlia, 2019 Pemberian pembinaan dan Pelatihan, untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pengelolaan ikan, pelatihan dan pengembangan sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan keterampilan para pelaku pengelola perikanan yang dianggap belum mampu untuk mengelola hasil tangkapan ikan karena faktor perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dalam melakukan pembinaan pemerintah daerah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan memfasilitasi sejumlah pelaku usaha pengolahan ikan dan masyarakat nelayan untuk mengikuti berbagai pelatihan pengolahan hasil perikanan. Peroses pembinaan yang di lakukan berupa pelatihan tentang tata cara penangkapan ikan yang benar, pengelolaan hasil ikan untuk menjadi hasil olahan yang dapat di jual, serta tata cara pemasaran hasil olahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru yang berfokus terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru yang berfokus terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan menunjukkan dari empat indikator yaitu Pendanaan, yaitu pemerintah memberikan dana bantuan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemberdayaan pengelolaan hasil penangkapan ikan untuk dapat di jadikan sebagai suatu usaha yang memiliki nilai jual. Sedangkan untuk para pengusaha kecil, pemerintah menyiapkan koperasi dan sebagainya sebagai suatu sumber untuk mempermudah masyarakat memperoleh bantuan dana guna untuk mendanai usaha yang di lakukannya.

Mendorong pemasaran. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Barru mendorong kepada pelaku usaha dapat memasarkan hasil pengelolaan ikan yang telah di buatnya.

Membantu saran dan prasarana. Pemerintah memberikan bantuan berupa sarana dan prasaranan kepada masyarakat nelayan untuk mengelolah hasil tangkapan ikannya yang kemudian akan di buat menjadi hasil olahan yang memiliki nilai jual. Saranan dan prasara yang di berikan pemerintah berupa penjemuran ikan kering, yang dapat membantu masyarakt untuk menjemur ikan keringnya sebelum di kirim ke daerah serta di jual di pasaran.

Pemberian pembinaan dan pelatihan. Pemerintah memberikam pembinaan serta pelatihan kepada masyarakat terkait dengan tata cara penangkapan ikan yang baik dan benar, pengelolaan hasil ikan menjadi makanan yang dapat di jual, misalnya pengelolaan ikan menjadi abon ikan, serta pengelolaan ikan menjadi ikan kering.

#### A. SARAN

1. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap masyarakat nelayan dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan nelayan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, peningkatan sarana dan prasarana, kemitraan usaha dan dukungan kelembagaan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
2. Pemerintah Daerah bersama stakeholder lainnya harus bekerja sama dalam dan saling bersinergi dalam pembangunan dan pemberdayaan nelayan khususnya di Kabupaten Barru. Selain Penting memberikan pemahaman pada nelayan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memberikan penyadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan

ekosistem laut serta memperbaiki/merehabilitasi ekosistem yang rusak dan menciptakan habitat biota baru yang layak dengan mengikutsertakan nelayan. Pemberdayaan nelayan dapat berjalan maksimal dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pemberdayaan nelayan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adawyah, R. (2007). *Pengolahan Dan Pengawetan Ikan*. Bumi Aksara. Hal.33-47
- Afrianti, L. H. (2013). *Teknologi Pengawetan Pangan*. Alfabeta.Hal. 1-115
- Bolkiah, A. S. (2021). Evaluasi Program Bidang Pemberdayaan Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 363–374.
- Cahyandi, K. (2021). Penguatan Ekonomi Masyarakat Nelayan dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup melalui Pendekatan Deverifikasi Produk Hasil Tangkap Ikan di Kabupaten Cilacap. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*. <https://doi.org/10.52475/saintara.v5i3.121>. Hal. 87-92
- Dahlia, D., Nuraeni, N., & Hadijah, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pengolahan Ikan Untuk Mendukung Program Mp3 Pemerintah Kabupaten Majene. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*. <https://doi.org/10.31850/jdm.v2i2.378>. Hal. 52-58
- Diniarti, N., Cokrowati, N., Setyowati, D. N., & Mukhlis, A. (2020). Edukasi Nilai Gizi Ikan Melalui Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Berbahan Baku Ikan Tongkol. *Abdi Insani*. Hal.49-54
- Edi Suharto. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. In *PT Refika Aditama*. Pages 274
- Effendi, N. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i1.10>. Hal. 73-80
- Faisal T, T. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*.
- Fauzi. (2005). *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Lautan Untuk Analisis Kebijakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hariyanto, S. (2014). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*.
- Irianto, S. (2008). *Nelayan Di Mata Kita Sebuah Perspektif Berpikir Sistem*. CV Sukabina. Hal 153-158

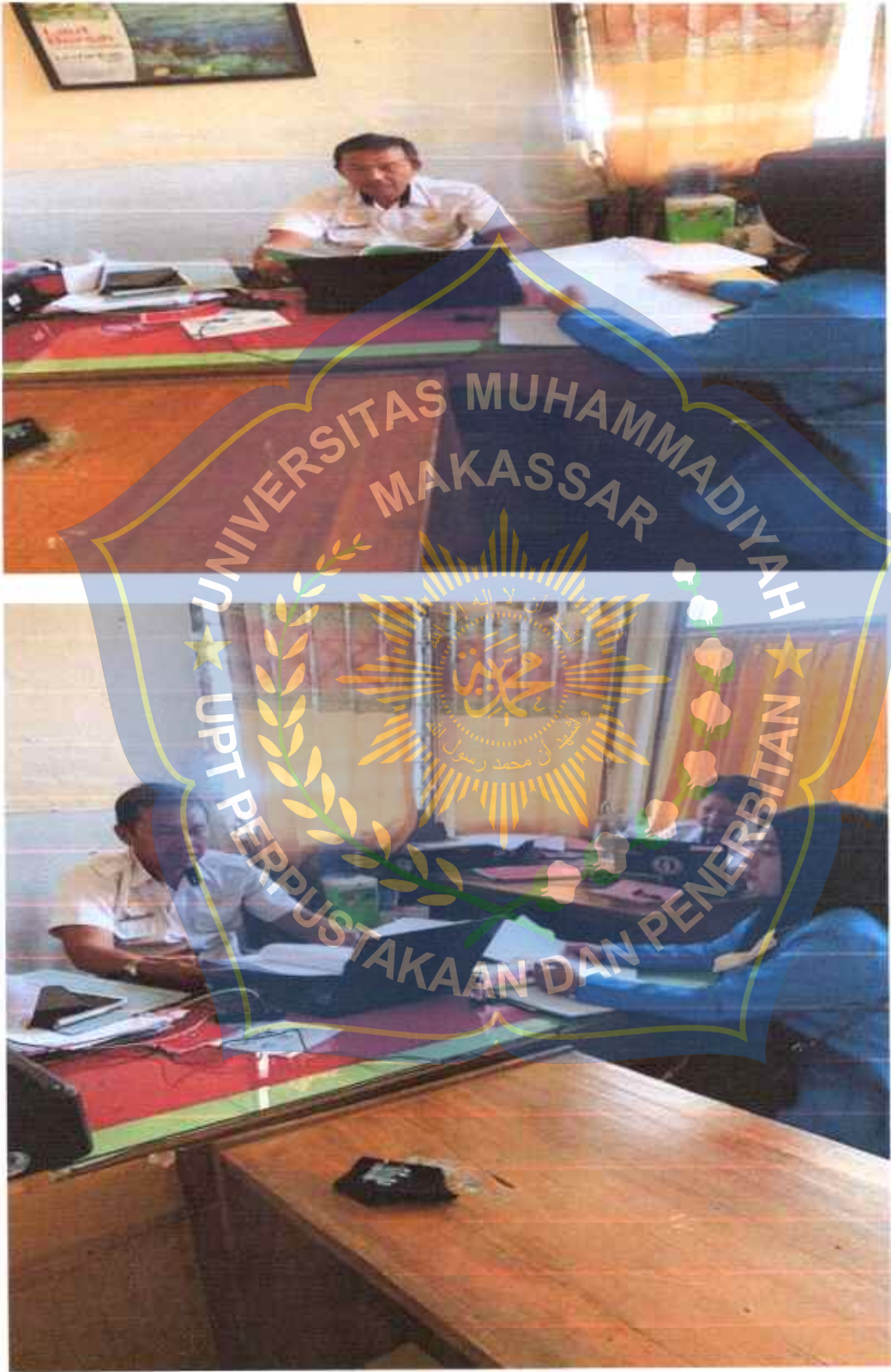
- Iswadi, I. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan Kelompok Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v2i1.1971>. Hal.1-114
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Poerwoko, T. M. dan S. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta. Hal.201-210
- Pratiwi, H. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. *Pemberdayaan Masyarakat*. Hal.14-27
- Prayogo, E. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lamongan Dan Di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*. Hal. 22-28
- Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2017). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal. 1-13 *Jurnal Penelitian Humaniora*. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1.13111>
- Reza, M., Nurani, T. W., & Solihin, I. (2020). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Industri Pengolahan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*. Hal. 123-134
- Rosnida Sari. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata (Meneropong usaha penginapan masyarakat Lokal dan Manca Negara di Desa Mon Ikeun Lhoknga). *Jurnal Al-Bayan*.
- Soeriadiredja, P. (2019). Strategi Masyarakat Nelayan Kedonganan Menghadapi Kemiskinan. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*. Hal. 33-42
- Suarnadwipa, N., Adnyana, I. W. B., & Wicaksana, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pelatihan Pengawetan Ikan Menggunakan Mesin Pendingin. *Buletin Udayana Mengabdi*. Hal.106-109
- Subiyanto, B. S. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Hal. 45-48. *E-Magazine Warta BP2SDM*.
- Sugianto, B., Kurniawati, D., & Abbas, Z. (2020). Otonomi Daerah Dan Peluang Investasi Untuk Percepatan Pembangunan. *Lex Librum : Jurnal Ilmu*

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In *Metodelogi Penelitian*.
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism. *Procedia Economics and Finance*. Hal. 413-422
- Totok Mardikanto &, P. S. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.
- Trisnani. (2016). Pola Komunikasi Masyarakat Nelayan di Era Teknologi Informasi. *Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*. Hal. 1-7
- Wijaya, A. B., & Fauzie, A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*. Hal. 1-13. <https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.259>
- Yefni, Y. (2018). Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*. <https://doi.org/10.24014/jmm.v3i2.6362> Hal. 42-61
- Yuliasni, R., Marlina, B., Kusumastuti, S. A., & Syahroni, C. (2019). Pengolahan Limbah Industri Pengolahan Ikan Dengan Teknologi Gabungan Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)-Wetland. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. <https://doi.org/10.29122/jtl.v20i1.2941>. Hal.123-132
- Yusra, Y., Efendi, Y., & Mardiah, A. (2019). Pelatihan Penanganan Dan Pengolahan Ikan Di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Vokasi*. <https://doi.org/10.30811/vokasi.v3i2.1308>. Hal.99-105

## LAMPIRAN

Photo Bersama Bapak Kepala Beserta Staf Dinas Perikanan Dan Kelautan





### Photo Bersama Masyarakat



### Peroses Penjemuran Ikan Kering

Proses pengeringan ikan kering di bawah trik matahari. jika ikan sudah kering maka akan di kemas kemudian di lakukan penjualan





**Peroses Pembersihan dan Pengemasan**

Setelah ikan kering, maka akan di lakukan pembersihan sebelum di kemas dan di jual di pasar.





## Proses Pembuatan Abon Ikan

1. Memilih ikan yang segar-segar untuk di buat abon ikan



2. Ikan yang telah di pilih kemudian di bersihkan



3. Setelah di bersihkan, ikan kemudian di masak hingga matang



4. Ikan yang telah di masak, di dinginkan terlebih dahulu kemudian di tumbuk hingga halus



5. Setelah halus, ikan di sangria atau di goreng, setelah itu abon ikan siap untuk di kemas



6. Abon ikan yang telah di kemas dan siap di pasarkan



## LAMPIRAN SURAT


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Abubakar No. 299 Telp. 840972 Fax (0411) 611580 Makassar 90251 E-mail: ipk@umh.ac.id


Nomor : 1391/05/C 4-VIII/IV/40/2022

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

12 Ramadhan 1443 H

13 April 2022 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah  
 Makassar, nomor: 0614/FSP/A.6-VIII/1443/IV H/2022 H tanggal 15 April 2022,  
 menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NURWANDA

No. Stambuk : 10564 1103818

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

 Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi  
 dengan judul:

**"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HASIL  
 PERIKANAN DI KELURAHAN SUMPANG BEWANGAE KABUPATEN BARRU"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 April 2022 s.d 16 Juni 2022

 Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk  
 melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran kottiran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

M. Nuzul LP 3M


 Dr. H. Abubakar Idhan, MP.  
 NISN 101 7716



**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**

Integrity · Professionalism · Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences

Ministera Iqbal Lantia 5 - Jalan Sultan Abdulkeri No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 865 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email: [info@unismuh.ac.id](mailto:info@unismuh.ac.id)  
Official Web: <http://unismuh.ac.id>

Nomor : D614/FSP/A.6-VIII/W/1443 H/2022 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Nurwanda  
Stambuk : 105641103819  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru  
Judul Skripsi : "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Keltziraa

Wassalamu alaikum wr. wb.

Makassar, 13 April 2022

Dekan,

Dr. Hji. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.  
NBM-730727



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia  
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara · Ilmu Pemerintahan · Ilmu Komunikasi  
Public Administration · Government Studies · Communication Science



# PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

## DINAS PENANAMAN MODAL,

### PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Mal Pelayanan Publik Manja Lt. 1-3 Jl. Iskandar Umar Trip. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://crimonline.barrukab.go.id> e-mail : [barrudpmsptk@gmail.com](mailto:barrudpmsptk@gmail.com) Kode Pos 90711

Barru, 30 April 2022

Nomor : 187/DPMPPTSPTK/IV/2022  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
 Yth. 1. Kepala Dinas Perikanan Kab. Barru  
 2. Kepala Dinas Kesehatan dan LKRM  
 Kab. Barru  
 3. Lurah Sumpang Binangas Kab. Barru  
 di Tempat

Berdasarkan Surat Kepala DPMPPTSPTK Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 20941/5.01/PTSP/2022 tanggal 19 April 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (di / Peneliti / Dosen / Pegawai) di bawah ini :

Nama : NURWANDA  
 Nomor Pokok : 105601103818  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Pekerjaan : Mahasiswa (SI)  
 Alamat : Lompengeng Desa Pan-Pan Kec. Tuntene Rilau Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Baidara yang berlangsung mulai tanggal 28 April 2022 s.d 30 Juni 2022, dalam rangka pemutihan *skripsi* dengan judul :

#### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HASIL PENANGKAPAN IKAN DI KECERAHAN SUMPANG BINANGAS KABUPATEN BARRU

Selanjutnya dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menanti semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengadahkan adat istiadat setempat.
4. Menyampaikan (stempel) sampel copy hasil penelitian kepada Kepala Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.
5. Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (di) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian surat ini untuk dimaklumi dan dilaksanakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,  
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan  
 Perikanan

FATMUSYATI PRU, SE  
 Pangkat : Pembina, IV/a  
 NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUKAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati/Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Camat Barru Kab. Barru;
4. Ketua I.PJM UNISNUH Makassar di Makassar;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringatan;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866072, 881593, Fax (0411) 865588



**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurwanda  
NIM : 105641103818  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

| No | Bab   | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1  | Bab 1 | 9 %   | 10 %         |
| 2  | Bab 2 | 25 %  | 25 %         |
| 3  | Bab 3 | 10 %  | 10 %         |
| 4  | Bab 4 | 9 %   | 10 %         |
| 5  | Bab 5 | 3 %   | 5 %          |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 15 Juli 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan

Nurwanda S. Hum, M.P.  
NIM. 964 591

BAB I Nurwanda - 105641103818

Originality Report

9%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS



Abd. Rahim, Diah Retno Dwi Hastuti.

"DETERMINAN PENDAPATAN NELAYAN  
TANGKAP TRADISIONAL WILAYAH PESISIR  
BARAT KABUPATEN BARRU", Jurnal Sosial  
Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2016

Publication

2%



gozobook.com

Internet Source

2%



idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%



scholar.unand.ac.id

Internet Source

2%



www.coursehero.com

Internet Source

2%

Exclude quotes: On

Exclude matches: < 2%

Exclude bibliography: On

BAB II Nurwanda--105641103818



BAB III Nuhwanda - 105641103818



BAB IV Nurwanda - 105641103818

ORIGINALITY REPORT

9%



4%

0%

7%

SIMILARITY INDEX (1) (2)

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman  
Student Paper

7%

jurnal.utu.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes

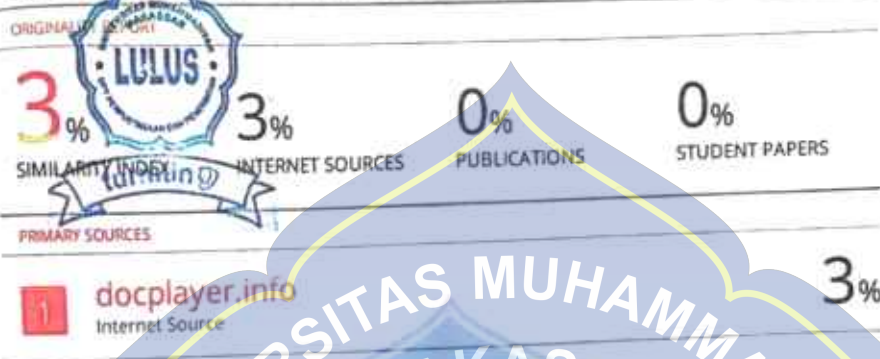
On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

BAB V Nurwanda - 105641103818



Exclude quotes

Exclude bibliography

On

Off

Exclude matches

< 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## RIWAYAT HIDUP



Nurwanda, Lahir pada tanggal 27 Oktober 2000, di Barru, Sulawesi selatan. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara, dari pasangan Darwis s,pd dan Musdalifah s,pd, Penulis pertama masuk pendidikan di Taman Kanak Kanak Aisyah pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2007, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN Padaelo kemudian tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP 01 Tanete Rilau kemudian tamat pada tahun 2015. Setelah tamat, penulis melanjutkan ke SMA 01 Barru dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis mendaftar sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2022 penulis mendapat gelar S1 pada Program Ilmu Pemerintahan dengan judul Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hasil penangkapan ikan di kelurahan sumpang binangae kabupaten barru. Semoga hasil penelitian ini dapat memebrikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Univeritas Muhammadiyah Makassar.